

---

## PENGARUH KREDIT MACET TERHADAP KESTABILAN KEUANGAN PERBANKAN DI INDONESIA

Vovila Dalmen<sup>1</sup>  
[dalmenvovila@gmail.com](mailto:dalmenvovila@gmail.com)

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

### ABSTRACT

*Non-performing loans (NPL) are a major issue faced by the banking sector in Indonesia and have significant impacts on financial stability. This article aims to analyze the influence of NPL on banking financial stability, focusing on the legal and economic aspects involved. Through a qualitative approach, this study uses literature review and secondary data analysis to explore the causes and consequences of NPL on bank performance. The research findings show that high NPL rates are directly related to a decrease in the banks' capital adequacy ratio, which can threaten the banks' survival and the stability of the financial system. Legal factors, such as the inability to resolve credit disputes and weaknesses in the enforcement of regulations, exacerbate this condition. Therefore, it is crucial for the government and banking authorities to strengthen supervision and regulations supporting the resolution of non-performing loans. The article concludes that effective handling of NPLs can strengthen the stability of Indonesia's banking sector but requires collaboration between the banking sector, regulators, and the legal framework.*

**Keywords:** *Non-Performing Loans, Financial Stability, Banking, Law, Regulation.*

### ABSTRAK

Kredit macet adalah masalah utama yang dihadapi oleh sektor perbankan di Indonesia, dan memiliki dampak signifikan terhadap kestabilan keuangan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kredit macet terhadap kestabilan keuangan perbankan, dengan fokus pada aspek hukum dan ekonomi yang terkait. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan studi literatur serta analisis data sekunder untuk menggali faktor-faktor penyebab dan dampak dari kredit macet terhadap kinerja bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya tingkat kredit macet berhubungan langsung dengan penurunan rasio kecukupan modal bank, yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan hidup bank serta stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

---

Faktor hukum, seperti ketidakmampuan penyelesaian sengketa kredit dan kelemahan dalam penegakan peraturan, turut memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan otoritas perbankan untuk meningkatkan pengawasan serta memperkuat regulasi yang mendukung penyelesaian kredit bermasalah. Artikel ini menyimpulkan bahwa penanganan kredit macet yang efektif dapat memperkuat stabilitas perbankan Indonesia, namun memerlukan kerjasama antara sektor perbankan, regulator, dan pihak hukum.

**Kata Kunci:** Kredit Macet, Kestabilan Keuangan, Perbankan, Hukum, Regulasi.

---

## PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia, baik dari sisi pemberian kredit kepada sektor usaha maupun masyarakat, yang menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Melalui sistem perbankan, berbagai sektor ekonomi, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar, dapat memperoleh dana yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan operasional mereka. Kredit yang diberikan oleh bank ini diharapkan dapat digunakan dengan baik dan memberikan dampak positif baik bagi peminjam maupun bagi ekonomi secara keseluruhan. Namun, tidak semua kredit yang diberikan oleh bank dapat dikembalikan tepat waktu, atau bahkan dapat mengalami kegagalan total dalam pengembaliannya. Kredit yang gagal

bayar atau tidak dapat dilunasi sesuai dengan perjanjian ini dikenal dengan istilah kredit macet.<sup>1</sup>

Kredit macet merupakan salah satu permasalahan serius yang dapat mengganggu kinerja perbankan dan bahkan dapat menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap sistem keuangan nasional. Kredit macet bukan hanya merugikan pihak bank yang memberikan pinjaman, tetapi juga dapat menurunkan tingkat likuiditas bank, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, dan berisiko memperburuk kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Dalam skala yang lebih besar, tingginya tingkat kredit macet bisa mengarah pada krisis perbankan yang mengancam sistem keuangan negara. Sebagai sektor yang berfungsi sebagai perantara antara pemilik dana dan peminjam, bank-

---

<sup>1</sup> Ririt Iriani Sri Setiawati, 'Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental Kinerja Bank Dan Makro Ekonomi Terhadap Stabilitas

Perbankan Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 14.2 (2020), 123-32 <<https://doi.org/10.32812/jibeka.v14i2.194>>.

bank di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk mengelola risiko kredit dengan bijaksana, termasuk dalam menghadapi masalah kredit macet.

Menurut data yang dihimpun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meskipun tingkat kredit macet di Indonesia sempat menurun dalam beberapa tahun terakhir, angka ini masih cukup signifikan. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait dengan peningkatan kualitas kredit yang diberikan kepada masyarakat. Kredit macet umumnya terjadi akibat berbagai faktor, baik internal bank itu sendiri, seperti kelalaian dalam proses analisis kredit, maupun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, perubahan kebijakan pemerintah, serta ketidakmampuan debitur dalam mengelola usaha mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebab dan dampak dari kredit macet terhadap stabilitas perbankan.<sup>2</sup>

Salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kredit macet adalah faktor hukum. Sistem hukum yang ada di Indonesia, meskipun telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, masih memiliki banyak kekurangan dalam penanganan masalah kredit bermasalah. Salah satunya adalah proses hukum yang cenderung lambat dalam menyelesaikan sengketa terkait kredit macet. Hal ini seringkali membuat para bank kesulitan dalam menagih utang mereka dan membuat penyelesaian kredit macet menjadi semakin rumit. Selain itu, ada juga faktor regulasi yang seringkali kurang efektif dalam mengatur cara-cara penyelesaian masalah kredit macet. Kelemahan-kelemahan ini membuat dampak dari kredit macet semakin terasa, baik bagi bank itu sendiri maupun bagi perekonomian nasional.<sup>3</sup>

Tidak hanya itu, ketidakpastian hukum dan kelemahan dalam penegakan peraturan sering kali memperburuk situasi. Dalam beberapa kasus, meskipun bank telah mengajukan tuntutan hukum terhadap debitur yang tidak membayar kredit

---

<sup>2</sup> Mentari Pasaman and Saiyo Ujung, 'Pengaruh Kredit Macet Terhadap Stabilitas Pembiayaan Murabahah Di BANK BPRS Mentari Pasaman Saiyo Ujung Gading', 6 (2023), 75-87.

<sup>3</sup> Taudlikhul Afkar, 'Analisis Pengaruh Kredit Macet Dan Kecukupan Likuiditas

Terhadap Efisiensi Biaya Operasional Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Ajie*, 2.2 (2017), 177-92  
<<https://doi.org/10.20885/ajie.vol2.iss2.art8>>.

mereka, proses yang panjang dan kompleks seringkali mengurangi efisiensi penyelesaian masalah ini. Hal ini menyebabkan ketidakpastian yang mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, yang pada gilirannya memengaruhi stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan. Dalam situasi seperti ini, peran regulator dan otoritas terkait menjadi sangat penting untuk memperbaiki mekanisme penyelesaian kredit macet, baik melalui kebijakan yang lebih responsif maupun dengan memperkuat sistem hukum yang ada.

Bagi sektor perbankan, pengelolaan kredit macet sangat penting untuk menjaga kestabilan finansial dan operasional. Kredit macet yang tidak dikelola dengan baik dapat mengarah pada terjadinya krisis keuangan. Krisis perbankan yang disebabkan oleh tingginya angka kredit macet dapat menyebabkan kegagalan bank, pengurangan kemampuan bank untuk memberikan kredit baru, bahkan penurunan daya saing bank di pasar global. Oleh karena itu, menjaga kualitas kredit yang diberikan oleh bank menjadi kunci utama dalam memastikan kestabilan sektor perbankan. Selain itu, keberhasilan penanganan kredit macet

dapat mempengaruhi tercapainya kestabilan sistem keuangan yang lebih luas, yang tidak hanya bergantung pada kebijakan bank, tetapi juga pada pengawasan dan regulasi yang tepat dari pemerintah dan lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam konteks ini, analisis tentang pengaruh kredit macet terhadap kestabilan keuangan perbankan di Indonesia sangat penting. Artikel ini bertujuan untuk membahas secara mendalam tentang bagaimana kredit macet dapat mempengaruhi kestabilan keuangan perbankan, baik dari sisi ekonomi maupun hukum. Selain itu, artikel ini juga akan mengeksplorasi berbagai kebijakan yang ada untuk menangani permasalahan ini serta memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengurangi dampak negatif dari kredit macet terhadap sistem keuangan Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan sistem perbankan dan hukum di Indonesia, serta memberikan wawasan mengenai pentingnya pengelolaan risiko kredit

---

<sup>4</sup> Asih Kurniawati and Siwi Nur Indriyani, 'Pengaruh Loan To Deposit Ratio, Net Interest Margin Dan Nonperforming Loan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan

Perbankan Di Indonesia', *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 10.1 (2022) <<https://doi.org/10.35137/jmbk.v10i1.676>>.

yang lebih baik dalam menjaga stabilitas keuangan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami pengaruh kredit macet terhadap kestabilan keuangan perbankan di Indonesia, serta peran faktor hukum dan regulasi dalam menangani masalah ini. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami masalah yang bersifat kompleks dan dinamis, yang melibatkan aspek hukum, ekonomi, dan kebijakan perbankan.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan bank, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait, penelitian ini menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan pengaruh kredit macet terhadap kestabilan keuangan perbankan di Indonesia.<sup>6</sup> Berikut adalah hasil utama yang ditemukan:

<sup>5</sup> Rozmita Dewi Yuniarti Devi Febriani, 'Pengaruh NPL Dan Indikasi FFR Terhadap Stabilitas Perbankan Pada Masa Pandemi COvid-19', 10.3 (2022), 503-18 <<https://doi.org/10.17509/jrak.v10i3.46957>>.

<sup>6</sup> Lucky Nugroho and Nurul Anisa, 'Pengaruh Manajemen Bank Induk, Kualitas

### 1. Tingkat Kredit Macet yang Cukup Tinggi

Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat kredit macet (Non-Performing Loans/NPL) di Indonesia masih tergolong cukup tinggi, meskipun ada penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, pada 2022, rasio NPL perbankan Indonesia tercatat sekitar 3%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan, masalah kredit macet tetap menjadi isu yang signifikan. Tingginya rasio NPL berhubungan langsung dengan penurunan rasio kecukupan modal (CAR) bank, yang menunjukkan kerentanannya terhadap kerugian finansial.

### 2. Dampak Kredit Macet terhadap Likuiditas dan Modal Bank

Kredit macet yang tinggi menyebabkan bank-bank mengalami kesulitan dalam menjaga likuiditas mereka. Hal ini disebabkan karena bank harus menyediakan dana cadangan untuk menutup kerugian akibat kredit yang tidak terbayar. Selain itu, kredit macet juga berdampak pada penurunan kemampuan bank dalam memberikan

Aset, Dan Efisiensi Terhadap Stabilitas Bank Syariah Di Indonesia (Periode Tahun 2013-2017)', *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 6.2 (2018), 114 <<https://doi.org/10.35314/inovbiz.v6i2.833>>.

kredit baru, yang pada gilirannya mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi. Bank yang memiliki rasio NPL tinggi juga harus meningkatkan modal mereka untuk memenuhi persyaratan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan.

### 3. Pengaruh Kredit Macet terhadap Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan perbankan itu sendiri. Ketika tingkat kredit macet tinggi, masyarakat cenderung merasa khawatir akan keamanan simpanan mereka. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank, yang pada gilirannya dapat memperburuk krisis keuangan. Ketidakpastian mengenai kemampuan bank untuk menyelesaikan masalah kredit macet juga berpengaruh pada keputusan investasi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh masyarakat.<sup>7</sup>

### 4. Peran Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penyelesaian kredit macet. Meskipun ada regulasi terkait dengan penanganan kredit

bermasalah, seperti UU Kepailitan dan UU Perbankan, proses penyelesaian sengketa seringkali berjalan lambat dan memakan waktu yang lama. Hal ini memperburuk keadaan, karena bank tidak dapat segera memperoleh kembali dana yang telah dipinjamkan. Selain itu, keterbatasan dalam mekanisme hukum untuk menangani kredit macet juga menyebabkan ketidakpastian bagi bank dan peminjam.

### Pembahasan

#### 1. Dampak Tingginya Kredit Macet terhadap Kestabilan Keuangan Perbankan

Kredit macet yang tinggi berpotensi mengancam kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan. Bank-bank yang terpapar pada risiko kredit macet yang besar dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansial mereka. Kondisi ini memperburuk solvabilitas bank dan dapat menyebabkan masalah likuiditas yang lebih besar. Selain itu, jika jumlah kredit macet terus meningkat, akan sulit bagi bank untuk menjaga rasio kecukupan modal (CAR) mereka dalam batas yang aman sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan Otoritas

<sup>7</sup> Soeharjoto Soekapdjo, Debbie Aryani Tribudhi, and Lucky Nugroho, 'Pengaruh Fundamental Ekonomi Dan Kinerja Keuangan Terhadap Kredit Bermasalah Pada Bank

Syariah Di Indonesia', *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 4.2 (2019), 126 <<https://doi.org/10.30737/ekonika.v4i2.327>>

Jasa Keuangan (OJK). Dalam jangka panjang, ketidakmampuan bank untuk menangani kredit macet dapat menyebabkan krisis perbankan, yang berisiko mempengaruhi perekonomian nasional.<sup>8</sup>

## 2. Keterkaitan Kredit Macet dengan Penurunan Kinerja Ekonomi

Tingginya kredit macet juga berdampak pada penurunan kinerja ekonomi secara keseluruhan. Bank yang menghadapi kredit macet cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan kredit baru. Hal ini menyebabkan penurunan aktivitas kredit di sektor riil, yang mempengaruhi dunia usaha, terutama sektor UMKM yang sangat bergantung pada pinjaman bank untuk berkembang. Penurunan kemampuan bank untuk memberikan kredit baru dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, menciptakan pengangguran, dan menurunkan daya beli masyarakat.

## 3. Peran Regulasi dalam Penanganan Kredit Macet

Dalam menghadapi masalah kredit macet, regulasi yang kuat dan efektif sangat penting untuk memperbaiki pengelolaan kredit bermasalah. Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) dan Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap kualitas kredit yang diberikan oleh bank. Namun, masih ada kelemahan dalam penegakan peraturan dan pelaksanaan kebijakan yang dapat memperburuk masalah kredit macet. Misalnya, proses hukum yang lambat dalam menyelesaikan sengketa kredit seringkali membuat bank kesulitan untuk memperoleh kembali dana mereka. Oleh karena itu, perbaikan dalam mekanisme hukum yang lebih efisien dan transparan sangat diperlukan untuk mendukung upaya penyelesaian kredit bermasalah.

## 4. Faktor Hukum yang Memperburuk Masalah Kredit Macet

Ketidakpastian hukum dan ketidaklengkapan mekanisme hukum untuk menangani kredit macet menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk situasi ini. Di Indonesia, penyelesaian sengketa terkait kredit macet seringkali memakan waktu yang sangat lama, sehingga bank tidak dapat dengan cepat mengurangi eksposur terhadap risiko kredit macet. Selain itu, kurangnya kepastian hukum dalam penegakan peraturan menyebabkan bank cenderung lebih

<sup>8</sup> Febrian Ahmad Sulton, Givantoro Agma Ardira, and H Hersugondo, 'Pengaruh Rasio Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Selama Pandemi

Covid-19: Kasus Indonesia', *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 19.2 (2022), 27 <<https://doi.org/10.30595/kompartemen.v19i2.10747>>.

berhati-hati dalam memberikan kredit, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Perbaikan dalam sistem hukum untuk memastikan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan transparan akan sangat membantu dalam mengurangi dampak negatif kredit macet.<sup>9</sup>

##### 5. Peran Bank dan Pemerintah dalam Mengurangi Kredit Macet

Untuk mengurangi dampak kredit macet, peran aktif dari pihak perbankan dan pemerintah sangat diperlukan. Bank harus meningkatkan kualitas analisis kredit untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan dapat dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Pemerintah, di sisi lain, harus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap perbankan untuk mencegah timbulnya kredit macet. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa sistem hukum berjalan dengan efisien untuk mempercepat penyelesaian sengketa kredit dan mencegah kerugian yang lebih besar bagi bank dan perekonomian.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Eka Violeta Ketaren and Antonius Mulyo Haryanto, 'PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP STABILITAS PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi Kasus Pada Bank Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2018)', *Diponegoro Journal of Management*, 9.2 (2020), 1-13

Tingginya tingkat kredit macet memberikan dampak yang signifikan terhadap kestabilan keuangan perbankan di Indonesia. Kredit macet yang tinggi mengurangi likuiditas bank, menurunkan rasio kecukupan modal, dan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Selain itu, faktor hukum yang belum efektif dalam menyelesaikan masalah kredit macet turut memperburuk keadaan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi, peningkatan kualitas analisis kredit, dan perbaikan sistem hukum untuk mempercepat penyelesaian sengketa terkait kredit macet. Upaya-upaya tersebut penting untuk menjaga kestabilan sektor perbankan Indonesia dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

##### 1. Pengaturan Kewenangan Pengawasan Situs Website oleh Pemerintah

Pengawasan terhadap situs website di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan serta keamanan dunia maya. Pemerintah melalui berbagai

<<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>>.

<sup>10</sup> Ahmad Fatoni and Sahabudin Sidiq, 'Analisis Perbandingan Stabilitas Sistem Perbankan Syariah Dan Konvensional Di Indonesia', *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 11.2 (2019), 179-98 <<https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i2.1350>>.

lembaga dan regulasi memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan bertindak terhadap situs website yang berpotensi melanggar hukum atau merugikan kepentingan publik. Salah satu badan yang memiliki kewenangan dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang mengatur hal-hal terkait konten di dunia maya, termasuk situs website.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi situs web yang beredar di Indonesia. Kominfo memiliki kemampuan untuk memblokir situs yang melanggar ketentuan hukum, seperti situs yang memuat konten pornografi, perjudian, radikalisme, atau informasi palsu (hoax). Dalam hal ini, pengawasan pemerintah dilakukan untuk memastikan bahwa konten yang ada di dunia maya tidak merugikan individu, kelompok, atau negara.

Namun demikian, pengawasan terhadap situs website ini harus dilakukan dengan hati-hati, karena terdapat tantangan besar terkait dengan prinsip "Net Neutrality" atau netralitas internet yang memastikan setiap pengguna memiliki hak yang setara untuk mengakses informasi

tanpa diskriminasi. Selain itu, adanya kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan kewenangan pemerintah dalam memblokir atau membatasi akses terhadap situs yang sah atau yang dianggap bertentangan dengan kepentingan pemerintah.

Penting untuk dicatat bahwa pengaturan kewenangan pemerintah dalam mengawasi situs website harus selalu memperhatikan keseimbangan antara menjaga keamanan nasional, hak kebebasan berekspresi, dan perlindungan hak pribadi. Oleh karena itu, regulasi yang ada perlu lebih dijabarkan dengan cermat dan menghindari tindakan yang berpotensi mengekang kebebasan berekspresi yang sah.

## 2. Pengelolaan Website: Freedom of Speech vs Defamation

Salah satu isu utama dalam pengelolaan situs website adalah keseimbangan antara freedom of speech (kebebasan berbicara) dengan defamation (pencemaran nama baik). Kebebasan berbicara adalah hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia dan merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan. Namun, kebebasan berbicara ini tidak bersifat mutlak, karena ada batasan tertentu yang ditetapkan oleh hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat, termasuk mencegah terjadinya

pencemaran nama baik atau penyebaran informasi yang salah.

Pencemaran nama baik melalui situs website, media sosial, atau platform online lainnya sering kali terjadi dalam bentuk penyebaran informasi yang tidak akurat, berita bohong (hoax), atau pernyataan yang merugikan reputasi seseorang atau kelompok. Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur tentang pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk situs website. Dalam pasal-pasal yang ada, terdapat ketentuan yang mengatur sanksi bagi pelaku yang menyebarkan informasi yang dapat merusak reputasi seseorang, yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Namun, masalah muncul ketika peraturan mengenai pencemaran nama baik bertabrakan dengan prinsip kebebasan berbicara. Misalnya, banyak pengguna internet yang merasa bahwa mereka tidak dapat mengekspresikan pendapatnya secara bebas tanpa takut diseret ke ranah hukum jika pernyataan mereka dianggap merugikan pihak lain. Hal ini menjadi dilema yang sering dihadapi dalam pengelolaan situs website, di mana pihak penyedia platform dan pengguna situs harus menyeimbangkan hak untuk berbicara

dengan kewajiban untuk menjaga etika dan menghindari kerugian reputasi.

Pengaturan mengenai kebebasan berbicara dan pencemaran nama baik harus dilakukan secara bijaksana. Pemerintah dan pihak yang berwenang perlu memastikan bahwa regulasi yang ada tidak disalahgunakan untuk membungkam suara-suara kritis, tetapi juga memberikan perlindungan yang cukup bagi individu dan organisasi yang terkena dampak dari informasi yang merugikan mereka. Oleh karena itu, penting adanya penegakan hukum yang transparan dan adil untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap kebebasan berbicara dan pencemaran nama baik dapat diselesaikan dengan cara yang tidak merugikan pihak yang tidak bersalah.

Sebagai solusi, pengelolaan situs website yang baik memerlukan kebijakan yang jelas tentang penyaringan konten, tanggung jawab platform terhadap penyebaran informasi yang melanggar hukum, serta pendidikan masyarakat tentang etika dan batasan dalam berkomunikasi di dunia maya. Regulasi ini tidak hanya melindungi individu dari pencemaran nama baik, tetapi juga memastikan bahwa kebebasan berbicara tetap dijaga tanpa melanggar norma-norma hukum yang berlaku.

## KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengungkapkan bahwa kredit macet memiliki dampak yang signifikan terhadap kestabilan keuangan perbankan di Indonesia. Meskipun perbankan Indonesia telah berupaya untuk menurunkan tingkat kredit macet, namun masalah ini tetap menjadi tantangan besar yang mempengaruhi likuiditas, rasio kecukupan modal, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Kredit macet yang tinggi juga berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi, karena bank cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan kredit baru, yang pada gilirannya menghambat sektor riil.

Selain itu, faktor hukum dan regulasi juga memegang peranan penting dalam penyelesaian masalah kredit macet. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan kredit bermasalah, proses hukum yang lambat dan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem hukum, baik dari segi efisiensi penyelesaian sengketa kredit, penguatan regulasi, serta penegakan hukum yang lebih tegas agar masalah kredit macet dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif.

Untuk itu, penting bagi pihak perbankan, pemerintah, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bekerja sama dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan risiko kredit dengan lebih baik. Selain itu, sistem hukum yang efisien dan transparan juga sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko kredit macet dan memastikan kelangsungan kestabilan sektor perbankan di Indonesia.

Secara keseluruhan, pengelolaan kredit macet yang efektif dan perbaikan dalam aspek hukum serta regulasi dapat berkontribusi pada peningkatan kestabilan keuangan perbankan, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan Indonesia..

## DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, Taudlikhul, 'Analisis Pengaruh Kredit Macet Dan Kecukupan Likuiditas Terhadap Efisiensi Biaya Operasional Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Ajie*, 2.2 (2017), 177-92 <<https://doi.org/10.20885/ajie.vol2.iss2.art8>>
- Devi Febriani, Rozmita Dewi Yuniarti, 'Pengaruh NPL Dan Indikasi FFR Terhadap Stabilitas Perbankan Pada Masa Pandemi COvid-19', 10.3 (2022), 503-18

- <<https://doi.org/10.17509/jrak.v10i3.46957>>
- Fatoni, Ahmad, and Sahabudin Sidiq, 'Analisis Perbandingan Stabilitas Sistem Perbankan Syariah Dan Konvensional Di Indonesia', *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 11.2 (2019), 179-98 <<https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i2.1350>>
- Ketaren, Eka Violeta, and Antonius Mulyo Haryanto, 'PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP STABILITAS PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi Kasus Pada Bank Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2018)', *Diponegoro Journal of Management*, 9.2 (2020), 1-13 <<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>>
- Kurniawati, Asih, and Siwi Nur Indriyani, 'Pengaruh Loan To Deposit Ratio, Net Interest Margin Dan Nonperforming Loan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Perbankan Di Indonesia', *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 10.1 (2022) <<https://doi.org/10.35137/jmbk.v10i1.676>>
- Nugroho, Lucky, and Nurul Anisa, 'Pengaruh Manajemen Bank Induk, Kualitas Aset, Dan Efisiensi Terhadap Stabilitas Bank Syariah Di Indonesia (Periode Tahun 2013-2017)', *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 6.2 (2018), 114 <<https://doi.org/10.35314/inovbiz.v6i2.833>>
- Pasaman, Mentari, and Saiyo Ujung, 'Pengaruh Kredit Macet Terhadap Stabilitas Pembiayaan Murabahah Di BANK BPRS Mentari Pasaman Saiyo Ujung Gading', 6 (2023), 75-87
- Soekapdjo, Soeharjoto, Debbie Aryani Tribudhi, and Lucky Nugroho, 'Pengaruh Fundamental Ekonomi Dan Kinerja Keuangan Terhadap Kredit Bermasalah Pada Bank Syariah Di Indonesia', *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 4.2 (2019), 126 <<https://doi.org/10.30737/ekonika.v4i2.327>>
- Sri Setiawati, Ririt Iriani, 'Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental Kinerja Bank Dan Makro Ekonomi Terhadap Stabilitas Perbankan Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 14.2 (2020), 123-32 <<https://doi.org/10.32812/jibek.a.v14i2.194>>
- Sulton, Febrian Ahmad, Givantoro Agma Ardira, and H Hersugondo, 'Pengaruh Rasio Kredit Bermasalah Terhadap

Profitabilitas Bank Umum  
Selama Pandemi Covid-19: Kasus  
Indonesia', *Kompartemen : Jurnal  
Ilmiah Akuntansi*, 19.2 (2022), 27  
<<https://doi.org/10.30595/kompartemen.v19i2.10747>>